



**TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN
(Studi Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)**

Oleh:

SUSI ANITA PATMAWATI

Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Makassar

Email: susianita.patmawati@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendeskripsikan (i) persepsi masyarakat tentang tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Rappocini Kota Makassar. (ii) faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Rappocini Kota Makassar. (iii) upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Jenis Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk mengolah data. penelitian ini bersifat kualitatif. Data kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik kumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri di kecamatan Rappocini Kota Makassar (i) persepsi masyarakat tentang tindakan main hakim sendiri itu beragam dan tidak ada persamaan, masih memunculkan pro dan kontra dimana masih ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. (ii) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu : faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, lemahnya penegakan hukum, adanya kemarahan dari masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hukum, (iii) Upaya aparat kepolisian dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri, yaitu: upaya preventif merupakan upaya penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan dengan usaha meningkatkan keseriusan polisi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi menangkap pelaku, sosialisasi KAMTIBMAS oleh polri dan patroli pada jam-jam rawan. upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu dengan memperdaya hukum melalui aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Kata Kunci: Tindakan Main Hakim Sendiri, Kekerasan, Penganiayaan

ABSTRACT

SUSI ANITA PATMAWATI. 2018. *Vigilante Action against Perpetrators of Violent Crime(Study in Rappocini Subdistrict in Makassar City)* (supervised by Heri Tahir and Firman Umar).

The study aims at investigating and describing (i) the perceptions of people on vigilante action done by people against perpetrators of violent crime in Rappocini in Makassar, (ii) the factors causing the vigilante action done by people against perpetrators of violent crime in Rappocini subdistrict in Makassar.

The study was qualitative research and analyzed the data qualitatively. Data were collected by employing observation, interview, and documentation.

The results of the study reveal that (i) the perceptions of people on vigilante action were various and there was no similarity, still brought out the pro and contra where there were people who agreed and disagreed, (ii) the factors causing the vigilante action were lacked of awareness on laws, weak law enforcement, angered from the people, and decreasing of public trust on legal performance, (iii) efforts done by the police and people in conducting prevention on vigilante action were the preventive action as a prevention before the crime occurred by improving police seriousness in solving the case by capturing the offender, socialization of KAMTIBMAS by the police and patrol in crime-prone hours; the repressive action conducted by law enforcement after vigilante action occurred by tricking the law through law enforcement officers.

Keywords: *vigilante action, violence, persecution*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Maka konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus memiliki legitimasi secara hukum.

Salah satu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang mengganggu ketenangan dan ketentraman yang banyak dijumpai di masyarakat bahkan hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, kejahatan pencurian itu sendiri telah diatur di dalam pasal 365 yang menegaskan : “diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau serta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri”.

Dalam kenyataannya pelaku melakukan perbuatan pidana, baik itu tindak pidana pencurian haruslah diproses secara hukum, namun dalam kenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan.

Dalam hukum pidana apabila korban kejahatan “membalas” secara sendiri atau dengan teman-teman, dilarang oleh hukum pidana yang dianggapnya “main hakim sendiri” dan bisa dituntut serta dihukum, massa yang main hakim sendiri juga dipandang telah melakukan “kejahatan”. Sejarah menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang konsekuen dan konsisten dapat mencegah atau setidaknya mengurangi perbuatan main hakim sendiri dan peradilan massa tidak manusiawi. (Soedjono: 37.2002).

Salah satu bentuk tindakan main hakim sendiri adalah pemukulan atau pengeroyokan. Ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan

pelaku kejahatan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan berpotensi melakukan ancaman secara fisik. Tindakan main hakim sendiri ini kemudian yang penulis akan tinjau dari persepsi masyarakat atau perspektif sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan.

Fenomena tindakan main hakim sendiri ini marak bahkan hampir setiap hari kita menyaksikan pencuri di massa oleh masyarakat tidak terkecuali di kota-kota besar seperti kota Makassar. Ada kecenderungan massa melakukan tindakan diluar dari hal yang sewajarnya. Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum.

Pada tahap observasi awal, data tindakan main hakim sendiri dengan kejahatan kekerasan yang diambil dikapolsek Rappocini yakni 109 kasus selama tahun 2017 sehingga tindakan ini dikategorikan masih tinggi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Rappocini.

Adapun kasus-kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi disekitar kecamatan Rappocini sebagai berikut: (1) Seorang yang bernama Andika Demo Akbar 19 tahun dihajar oleh warga karena melakukan pencurian di umah kos-kosan di jalan ppelita raya no. 2 kelurahan Ballaparang, kecamatan Rappocini (beritakota makassar, 2017), (2) seorang begal yang bernama Husain umur 30 tahun yang merupakan warga toli-toi menjadi bulan-bulanan massa didepan toko eiger jalan Rappocini karena melakukan aksinya sekitar jam 12.00 malam ada hari selasa tanggal 01 bulan mei 2018. (liputan8, 2108). (3) seorang yang bernama Amran alias Sambas melakukan pencurian dengan kekerasan/begal, tewas setelah diamuk massa di jalan tamalate 1 tepatnya di depan kampus fakultas ilmu pendidikan UNM kelurahan Rappocini yang terjadi pada hari senin tanggal 7 september 2015 skitar pukul 16.00 Wita. (beritakotaonline, 2018). Penegakan hukum

kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan memberlakukan hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan pembalasan fisik sebagai solusi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Realita hukum pidana pada masyarakat tidak semudah yang dipaparkan di atas karena banyaknya permasalahan yang bermunculan terutama diantaranya permasalahan tindak pidana yang semakin kompleks dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern sehingga tumbuh serta meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil pengamatan, hal ini terjadi akibat proses panjang sistem peradilan yang kurang mendidik dimana seringkali tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dibebaskan oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun diproses sampai pengadilan, hukum yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian membuat masyarakat yang merasa keamanan dan ketenteramannya terganggu justru akan kembali untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Fenomena sosial yang terjadi antara lain, terjadinya pergeseran pola-pola kejahatan "street crime" atau kejahatan jalanan yang konvensional, yang kualitasnya meningkat dan semakin sukar ditangani. Salah satu cirinya yang menonjol adalah kejahatan dengan kekerasan, kebrutalan dan kenekatan dengan korban-korban yang mengenaskan mewarnai respon masyarakat yang keras pula

dengan "main hakim sendiri" dan seolah-olah menerapkan peradilan masyarakat, yang terkadang membuat orang berdiri bulu romanya. Contoh yang terjadi ketika pencuri motor harus dibakar massa sampai mati.

Di Kecamatan Rappocinimerupakan kawasan yang padat penduduk sehingga tidak menutup kemungkinan sering terjadi dan tindakan main hakim dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat.

Main hakim sendiri biasanya, diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Andi Hamzah (1986:167)

Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali. (Sudikno, 2007: 23)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa main hakim sendiri adalah perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Sedangkan tindakan diartikan sebagai "(1) Perbuatan, sesuatu yang dilakukan; (2) tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu" (KBBI, 2008:904)

Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang secara sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah sebagai perbuatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Di samping itu, tindakan main hakim sendiri dapat juga diartikan sebagai orang atau kelompok yang mempermainkan hukum dengan cara melakukan kekerasan kepada orang lain yang bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku. Seperti kejahatan dengan gambaran

yang disajikan lewat tabloid, televisi ini merupakan kejahatan dalam peristiwa keseharian, salah satu kasus yang terjadi di Babelan Kabupaten Bekasi, Muh al Zahra alias zoya yang tewas dibakar massa karena dituduh mencuri amplifiyer mushallah di kampung muara bakti (Tribun Timur, 2017).

Tindakan menghakimi sendiri ini dilarang dan pada umumnya merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak selalu demikian. Dalam hukum perdata tindakan menghakimi sendiri yang dibolehkan ialah misalnya bahwa seseorang dibolehkan menebang atau memotong dahan pohon milik tetangga yang menjulur ke pekarangannya, setelah tetangga itu diminta untuk memotongnya tetapi menolak, asal yang memotong dahan itu tidak menginjak pekarangan tetangga yang bersangkutan. Pada hakekatnya tindakan ini merupakan "*eigenrichting*", tetapi dibolehkan berbeda dari peersfektif perdata diatas, dalam persfektif pidana Tindakan main hakim sendiri merupakan fenomena sosial yang dianggap menyalahi ketentuan bermasyarakat. Di Indonesia berdasarkan hukum tidak ditemukan dasar pbenarannya, khususnya dari sudut pandang hukum pidana. Bahkan tindakan main hakim sendiri dipandang sebagai tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh sistem hukum yang berlaku. Masyarakat atau individu yang melakukan tindakan main hakim sendiri dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Setiap pelaku tindakan main hakim sendiri harus mendapat hukuman atau sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Membahas tentang kesadaran hukum serta di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial jika ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat dari para ahli hukum yang bersifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan, salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar kabsahan hukum tertulis, serta kenyataan daripada dipatuhinya hukum tersebut.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada tau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan

terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Suatu konsepsi lain erat kaitannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (legal culture). Konsepsi ini secara relative baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihail nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkupnya. hal ini disebabkan hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, betapa pun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Oleh karena hukum tersebut merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan, lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola perilaku hukum. (Soerjono Soekanto, 1982:140).

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

Di dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi, terhadap suatu sistem hukum tertentu, kita sudah jelas akan mudah dapat menarik kesimpulan tentang hukum yang hidup dalam suatu daerah tertentu, tetapi bila ditemukan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu sistem hukum itu rendah, maka untuk menarik kesimpulannya harus hati-hati, karena mungkin saja tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah, terdapat hukum yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia, telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat terhadap penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Pada gilirannya, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Menurut Stephen Chafer dalam Mulyana mengenai kejahatan-kejahatan kekerasan di Florida mendasarkan rumusannya pada batasan Kelompok Internasional Para Ahli PBB yang beranggapan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan dan pencurian berat. Sedangkan pelakunya adalah mereka yang menjalankan kejahatan-kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia. (Mulyana, 1982).

1. Pengertian Kejahatan dengan Kekerasan
Kejahatan (*crime*) adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan sejahtera (cukup sandang, pangan dan papan). Rasa

aman dan sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya yaitu: kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. (Soedjono Dirdjosisworo, 2002: 1).

Oleh sebab itu apa yang ideal tidaklah selalu realistik karena di alam nyata adanya penyimpangan perilaku (*deviant behavior*) sudah merupakan bagian dari masyarakat dan sudah dapat dipastikan apabila kenyataan empirik menunjukkan bahwa tingkah laku hukum tidaklah akan selalu berjalan beriringan dengan tingkah laku sosial, atau apa yang menjadi seharusnya (*law of in the books*) tidaklah selalu demikian dengan apa yang menjadi senyatanya didalam masyarakat (*law in action*).

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut: Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:42) adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Jika kita perhatikan rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum Pidana. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Manusia membentuk perilaku dirinya melalui hukum dengan maksud supaya ia dapat hidup dengan damai/aman dalam berinteraksi demi sesamanya. Namun ada beberapa perilaku yang dapat dikategorikan kekerasan dapat dibenarkan yakni: 1) orang yang membela diri, 2) perang, 3) kekerasan yang perlu dilakukan alat Negara dalam

menegakkan hukum, dan 4) hukuman yang diberikan oleh Negara. Artinya diluar konteks tersebut kekerasan tidak bisa dibenarkan dengan dalih atau alasan apapun. Menurut Ende Hasbi (2016).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yakni; tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan kekerasan (Studi diKecamatan Rappocini Kota Makassar)".Maka fokus penelitian ini adalah Persepsi masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri, faktor-faktor yang mendorong orang atau masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, dan upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri di Kota Makasar.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sewenang-wenang dan tanpa hak terhadap pelaku kejahatan yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan seperti pemukulan, bahkan dengan cara-cara sadis berupa pembakaran hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindakan-tindakan merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat, Persepsi masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri adalah tanggapan, pandangan dan sikap terhadap perbuatan orang-orang atau sekelompok orang secara sewenang-wenang kepada orang yang dianggap bersalah, Faktor-faktor yang mendorong diartikan sebagai hal-hal atau kondisi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan karena didorong oleh kondisi emosi seperti rasa benci, dendam, rasa kurang puas, serta pengaruh lingkungan sehingga orang atau kelompok tersebut bertindak secara spontan dan di luar kontrol pribadinya, Upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri adalah program, kegiatan, dan cara yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi tindakan sewenang-wenang yang

dilakukan oleh sekelompok orang (masyarakat) terhadap orang yang dianggap bersalah.

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data primer bersumber dari masyarakat dan anggota kepolisian sektor Rappocini, Data sekunder bersumber dari sata yang berupa dokumen, literatur-literatur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian

F. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berupa sekumpulan pertanyaan yang telah disusun sebagai pedoman dalam melakukan wawancara terhadap informan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lembar observasi

Lembar observasi berupa selembaran untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari hasil observasi yang dilakukan terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Catatan dokumentasi

Catatan dokumentasi berupa catatan yang diambil tentang sejumlah dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Catatan dokumentasi juga menjadi pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara

Alat perekam

Alat perekam adalah alat yang digunakan untuk mereka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti maupun informan terkait dengan masalah yang diteliti.

Kamera

Kamera digunakan untuk membuat suatu dokumnetasi kegiatan yang dilakukan peneliti terhadap informan dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, pandangan, dan sikap mengenai kejadian-kejadian tindakan main hakim sendiri yang pernah terjadi.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data khususnya data primer, sehingga peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Data yang paling penting untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah data tentang tindakan main hakim sendiri yang dilakukan orang atau masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang

didapatkannya. Sebagai alat bantu dalam wawancara digunakanlah pedoman wawancara dan alat perekam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data selain dari wawancara dan observasi mengenai kondisi di lapangan tempat penelitian yakni di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang berupa foto atau gambar.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar dan penjelasan sebagai hasil penelitian dalam kaitannya dengan perbuatan masyarakat yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan dengan hukum yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa fokus permasalahan di antaranya sebagai berikut, Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Rappocini Kota Makassar, Apa yang mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Rappocini Kota Makassar, Bagaimanakah upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku kejahatan kekerasan di Rappocini Kota Makassar.

1. Persepsi masyarakat tentang tindakan main hakim sendiriterhadap pelaku kejahatan kekerasan di Kecamatan Rappocini berbeda-beda.

Berdasarkan observasi di lapangan menurut hemat penulis bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang baik itu pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain haruslah diproses secara hukum. Namun dalam kenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya pada pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Perbuatan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di dalam masyarakat pada

dasarnya dilarang oleh Undang-Undang, karena yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat adalah pejabat penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Berikut pendapat aparat penegak hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri.

2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri.

Masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kepolisian serta masyarakat sudah muak dan bosan dengan mekanisme yang bertele-tele dan ujung-ujungnya hasilnya sama saja hingga akhirnya kemarahan dan kekecewaan masyarakat semakin bertumpuk dan melakukan jalan pintas dengan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap kejahatan kekerasan

Perlunya upaya peningkatan kualitas sedang dan terus dilakukan pihak polsek, terutama melalui program-program pembinaan sumber daya dan pengembangan teknologi, penulis ingin menfokuskan diri pada aspek kuantitas. Keterbatasan kuantitas inilah nampaknya yang ikut membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum melemah. Artinya, bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kita harus memiliki kekuatan kepolisian yang cukup sehingga mampu menangani sebanyak mungkin pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Kendalanya sekarang melihat jumlah polisi dari rasio penduduk yang kurang lebih 1:1000 maka perlu peningkatan jumlah kepolisian dalam hal sarana dan prasarannya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi masyarakat mengenai tindakan main hakim sendiri

Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai tindakan main hakim sendiri dapat dilihat hasil dari wawancara peneliti dengan informan dimana hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan bahwa pada umumnya sebagian masyarakat menanggapi jika tindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan

oleh peraturan-peraturan maupun undang-undang di Indonesia. Maraknya tindakan main hakim sendiri di Kota Makasar khususnya di Kecamatan Rappocini sebagian besar disebabkan karena dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat yang menyebabkan perbuatan tindak main hakim sendiri merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memberikan suatu sanksi secara individu tanpa memperhatikan proses hukum yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap kejahatan kekerasan

- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat moderen serta dalam masyarakat primitif peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilakunya atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.

Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut.

Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan yang bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat.

Dari beberapa anggota kepolisian yang sempat penulis wawancarai, hal inilah merupakan salah satu faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai menurun karena hukum dianggap tidak lagi dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu keadilan.

2) Lemahnya Penegakan Hukum

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Kota Makassar khususnya di kecamatan Rappocini sebagian besar disebabkan karena dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Kenyataan tersebut di atas, maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.

Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan si korban atau pelaku tindakan pidana meninggal dunia. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi. Kasus-kasus seperti ini banyak yang di proses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga dilepas begitu saja, tetapi pada umumnya di kecamatan rappocini kota makassar masih sering dijumpai tidak pidana main hakim sendiri. Kondisi masyarakat di kota makassar sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, masih adanya perilaku anggota masyarakat lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif. Masyarakat berfikir bahwa negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah

masyarakat namun dalam kenyataannya tidak begitu disamping itu rasa kemanusiaan sebagian anggota masyarakat juga sudah mulai turun.

3) Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Penegak Hukum

Maraknya kejadian-kejadian seperti tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk kekecewaan anggota masyarakat terhadap penegakan hukum yang sering tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Maka, bukan tidak mungkin akan muncul ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap penegakan hukum yang di sedang dilakukan oleh aparat hukum. Sehingga, titik kulminasi yang terjadi ketika ketidakpercayaan anggota masyarakat itu akan berimbas pada tindakan-tindakan di luar dari tataran hukum yang berlaku seperti tindakan main hakim itu sendiri.

3. Upaya Penegak Hukum dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri

1. Upaya Penanggulangan dengan Cara Preventif

Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan pencegahan preventif ini jauh lebih baik dibandingkan tindakan pencegahan represif karena upaya preventif tidak akan menjadikan seorang pelaku kejahatan babak belur bahkan meninggal dunia karena perbuatan tindak main hakim sendiri yang tidak lagi dapat dibendung. Upaya preventif juga tidak menjadikan posisi pelaku kejahatan sebagai korban. Selain itu, upaya ini memberikan proses hukum yang tidak rumit, misalnya : Ketika penegak hukum melakukan upaya preventif dengan menangkap pelaku pencurian, maka proses hukum pada saat mengadili hanyalah 1 orang saja, namun ketika terjadi tindakan main hakim sendiri dan pelaku kejahatan meninggal dunia maka otomatis proses hukum yang akan dilalui lebih berat dan berlangsung lama dan rumit, karena akan banyak orang yang terlibat di dalamnya sehingga memerlukan penyelidikan dan penyidikan yang sangat lama. Dalam kaitannya

dengan penanggulangan tindakan main hakim sendiri kecamatan rappocini kota makassar yakni:

Banyak masyarakat yang beranggapan jika perbuatan main hakim sendiri terjadi ketika pihak kepolisian terlihat masa bodoh dalam menanggapi laporan-laporan masyarakat yang masuk. Selain itu juga, dengan menghakimi pelaku tindak pidana maka masyarakat merasa adil dengan apa yang pelaku perbuat. Kemudian, perbuatan masyarakat tersebut terkadang membuat jerah bagi pelaku pencurian, sebelumnya bertolak dari kondisi tersebut, sudah sepatutnya kepolisian harus menangani masalah pencurian yang terjadi dengan serius. Serius yang berarti aparat kepolisian yang diberikan kepercayaan dalam menangani kasus pencurian yang terjadi di Kecamatan Rappocini Kota Makassar sudah sepatutnya memiliki keseriusan agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Keseriusan itu terlihat dengan melakukan segala upaya menggunakan kewenangannya untuk menangkap pelaku pencurian yang sering meresahkan masyarakat. Sehingga kesabarannya dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri dengan menghakimi pelaku pencurian tersebut.

a. Sosialisasi yang dilakukan oleh BHABINKAMTIBMAS

Aparat penegak hukum, sebelum terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kecamatan Rappocini banyak melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh bagian BHABINKAMTIBMAS. Adapun didalam sosialisasi tersebut aparat penegak hukum membina masyarakat dan banyak memberikan pemahaman mengenai bagaimana masyarakat bisa saling menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tercapai lingkungan yang baik.

b. Patroli Pada Jam-Jam Rawan

Patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada jam-jam rawan ini diharapkan memberi rasa aman kepada warga sehingga dapat tidur dengan nyenyak. Patroli ini, dapat mencegah tindakan main hakim sendiri karena pelaku yang nantinya kedapatan ditemukan langsung oleh pihak kepolisian.

2. Upaya Penanggulangan dengan Cara Represif

Penanggulangan tindakan main hakim sendiri secara represif adalah tindakan yang dilakukan

oleh penegak hukum atau masyarakat setelah terjadinya suatu kejahatan. Tindakan represif adalah dengan memberdayakan hukum melalui aparat penegak hukum yakni Kejaksaan, kehakiman, dan khususnya tugas utama pihak kepolisian ketika mendapat laporan dari masyarakat atau korban yang menjadi kejahatan. Memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan tindakan main hakim sendiri merupakan hal penting dalam rangka penanggulangan preventif dengan penanggulangan represif. Dalam penanganan tindakan main hakim sendiri diharapkan aparat penegak hukum, apakah dari tingkat kepolisian yang melakukan penyelidikan, Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan, ataupun hakim yang memutuskan hukuman bagi si pelaku tersebut agar mampu bekerja sesuai dengan kode etik profesionalisme dibidangnya masing-masing.

SIMPULAN

Bagian ini merupakan keseluruhan hasil dari pembahasan yang penulis angkat sebagai Tesis

1. persepsi masyarakat tentang tindakan main hakim sendiri itu beragam dan tidak ada persamaan, masih memunculkan pro dan kontra dimana masih ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu : pertama, faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum .Kedua, faktor lemahnya penegakan hukum. Ketiga, adanya kemarahan dari masyarakat. Keempat, faktor menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat hukum.
3. Upaya aparat kepolisian dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri, yaitu: Pertama, upaya preventif dalam artian upaya penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan dengan usaha meningkatkan keseriusan polisi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi menangkap pelaku, sosialisasi KAMTIBMAS oleh POLRI dan patrol pada jam-jam rawan. Kedua, upaya represif adalah upaya/tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Dengan kata lain, tindakan represif adalah

tindakan yang dilakukan dengan memperdaya hukum melalui aparat penegak hukum secara keseluruhan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Seharusnya tindakan main hakim sendiri harus ditegaskan bahwa itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, agar tidak ada lagi kesalahpahaman tentang tindakan main hakim sendiri. Pemahaman masyarakat yang masih setuju dengan tindakan main hakim sendiri sepatutnya diluruskan meskipun alasan dalam melakukann tindakan itu berdasarkan bahwa masyarakat merasa dirugikan.
2. Pihak kepolisian harusnya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin agar kepercayaan masyarakat tumbuh kembali dengan meningkatkan kinerjanya.
3. Dalam upaya penanggulangan terjadinya tindakan main hakim sendiri maka pemerintah dalam hal ini pihak penegak hukum khususnya pihak kepolisian perlu mengadakan sosialisasi yang intensif ke tengah-tengah masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dirdjosisworo,soedjono.2002. *Respon terhadap kejahatan*.Bandung : STHB press.
- Friedman, Lawrence. M, 2001.*American Law InIntroduction*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Gunakaya, widiada.1988.*Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV Armico: Bandung.
- Hadikusuma, hilman. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hendrojono.2005. *Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi
- KBBI.2008.Pusat Bahasa Dan Departemen Pendidikan Nasional:Jakarta.
- Kusumah, W Mulyana. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-*

Kejahatan Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahardjo, satcipto.2003.*Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Control Sosial*. PT. Citra Aditya Bakti: Semarang.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta.

Sudikno Metrokusumo.2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.Yogyakarta: Liberty.